PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik, Vol. 1 No. 2, Juli (2021)
e-ISSN: 2797-0469

KEBIJAKAN ANTI RADIKALISME DUNIA PENDIDIKAN DITINJAU DARI PANCASILA DAN SOLUSINYA

Abdon A. Amtiran
Direktur Pasca Sarjana STT IKAT Jakarta
abdonamtiran@sttikat.ac.id

Aloysius Jondar
Peserta Program Doktoral STT IKAT Jakarta
Pengajar MKDU UNTAG Surabaya
Dosen Magister Manajemen UTS Surabaya
aloysiuscendana@gmail.com

ABSTRAK

Gerakan radikalisme yang berorientasi pada perubahan ideologi Pancasila merupakan ancaman besar jika tidak diambil tindakan tegas. Diperlukan identifikasi masalah untuk menemukan jawaban dalam artikel ini di antaranya adalah 1). Apa makna radikalisme bagi bangsa Indonesia; 2). Apa penyebab penyebaran radikalisme di Indonesia; 3). Apakah ideologi Pancasila bertentangan dengan radikalisme; 4). Strategi kebijakan apa yang digunakan untuk mencegah radikalisme masuk ke dunia pendidikan. Temuan dalam penelitian ini adalah 1) Arti kata radikalisme telah bergeser menjadi tindakan kekerasan yang melakukan pemaksaan atas kehendaknya. 2) Ada radikalisme di Indonesia karena ingin mengingat ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kemiskinan, masalah sosial ekonomi, masalah politik. 3) Ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia tidak boleh disamakan dengan paham radikalisme yang merusak tatanan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. 4) Strategi kebijakan berupa pembinaan pencegahan radikalisme di kampus adalah metode pembinaan berjenjang dan berkelanjutan.

Keywords: *Ideology, Radicalism*

A. PENDAHULUAN

Berbagai persepsi yang berkembang di masyarakat Indonesia terhadap dunia pendidikan khsususnya Perguruan Tinggi adalah sarana mencetak tenaga inlektual bangsa dan negara. Sebagai sarana pembelajaran peserta didik yang ingin mendapatkan ilmu yang tinggi sehingga menjadi anak yang pintar dan cerdas di kemudian hari. Bahkan ada yang menganalogikan sebagai gudang ilmu. Ketika masyarakat membutuhkan seorang pakar dalam bidang tertentu mereka akan mencarinya di kampus.

Dalam skala kecil, ketika anggota masyarakat kampus berkumpul dalam suatu pertemuan di sebuah desa, mereka masih dipercaya sebagai orang yang pintar menjelaskan atau menyelesaikan sebuah masalah. Hal ini dilakukan atas dasar kesadaran dalam memaknakan pendidikan yaitu memanusiakan manusia. Hal ini menjadi penting, karena jika manusia tidak mengetahui dan memahami

nilai-nilai kemanusiaan, maka akan jatuh ke dalam sifat-sifat hewan atau binatang. Akal manusia ini menjadi semakin cerdas setelah mengalami proses pendidikan sesuai dengan tujuannya.

Pengembangan pendidikan di Indonnesia memiliki cita-cita yang luhur dan mulia yaitu berorientasi pada pengembangan pendidikan yang memiliki nilai, moral dan etika serta karakter melalui pembelajaran. Melalui pengembangan penddikan yang berorientsi pada sikap moral anak didik diharapkan mereka menjadi anak muda yang cerdas dalam pengembangan *knowledge,* cerdas dalam emosi, cerdas dalam bahasa, cerdas dalam mental yang tahan dari tantangan. Bahkan rancangan terhadap pengembangan nilai pendidikan sejak SD (Sekolah Dasar) sampai dengan PT (Perguruan Tinggi) tidak hanya mengembangkan sikap yang cerdas tetapi dilengkapi dengan pengembangan sikap moral dan penanaman karakter. Kesemuanya diharapkan membangun kepribadian anak bangsa yang berkompeten sesui dengan keilmuannya.

Berbagai upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan, untuk menghindari mahasiswa dari pemikiran doktrin paham radikalisme, misalnya pembinaan wawasan kebangsaan. Doktrin penanaman nilai-nilai dari Ideologi Pancasila tetap digalakan dari pembinaan pembentukan sikap mahasiswa terhadap kelompok radikal maupun pembentukan sikap dengan menginternasasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan keseharian pada lembaga pendidikan selama ini.

Dalam realitanya di dalam usaha pengembangan penddikan tersebut, ternyata masih ditemukan anak didik yang terlibat dalam tindakan kekerasan yang diilhami oleh paham radikalisme. Anak didik lebih mudah terpengaruh ajaran atau ideologi lain daripada ideologi Negara Republk Indonesia yang sudah memberikan kemerdekaan, kebebasan hidup di tanah air ini. Dari hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh pihak akademisi maupun lembaga negara membuktikan kaum terpelajar dan mahasiswa, dosen sudah ada yang terlibat dari paham radikalisme ini.

Bertolak dari pandangan yang telah dikemukakan, maka perlu dilakukan kajian atas kehadiran paham radikalisme di Indonesia. Karena itu, permasalahan yang akan dicari jawaban dalam kajin ini, 1) Apakah makna istilah radikalisme di Indonesia 2) Apa ciri-ciri paham radikalisme dan penyebab paparan paham radikalisme di Indonesia 3) Strategi kebijakan apa yang digunakan dalam menangkal gerakan radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila serta solusinya terhadap dunia pendidikan khususnya dalam rangka membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan penulis untuk tulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan menggunakan data kepustakaan. Data yang diperoleh untuk dipelajari sehingga menjadi sebuah artikel yaitu data jurnal ilmiah maupun buku-buku yang berkaitan dengan kasus radikalisme di Indonesia. Data yang diperoleh digunakan untuk dipelajari, dianalisa sehingga sebuah narasi yang bisa dimaknakan.

Analisis yang dilakukan penulis yaitu mennggunakan pendekatan deduksi ke induksi. Teori dinalisis berdasarkan kasus radikalisme yang berkembang di tanah air. Untuk mengaitkan antara teori (konsep ideologi Pancasila) dan realita berdasarkan logika dan pola pikir yang sistematis dan akurat. Dalam melakukan pemaknaan terhadap temuan ini, penulis menggunakan pendekatan *comprehensive* untuk membandingkan teori atau konsep ideologi Pancasila dan narasi yang ditemukan.

C. PEMBAHASAN.

Pergeseran makna istilah radikalisme.

Istilah radiklisme ini mengalami pergeseran makna yang tidak lagi mengacu pada konten yang sesuai dengan historisnya. Secara historis maknanya sangat mulia yaitu orang yang mendalami sebuah persoalan hingga kepada pokok permasalahan yang sebenarnya.

Secara etimologis kata radikal berasal dari Bahasa Latin yatu *radix* yang berarti akar dan isme artinya gerakan. Dengan demikian, berpikir secara radikal sama artinya dengan orang yang berpikir hingga ke akar –akarnya. Orang yang radikal biasanya orang yang mengerti pada sebuah permasalahan hingga ke akar-akarnya. Mereka lebihsering memegang teguh pada sebuah prinsip hingga pada akar permasalahannya. Dengan demikian, kata radikalisme secara etimologis yatu gerakan yang memiliki akar yang kuat. Dalam kamus Bahasa Inggris kata *radical* bersinonim dengan fundamental, fanatik, revolusioner, ekstrem, dan menyeluruh. Kata *radicalism* dimaknai sebagai doktrin atau praktik paham ekstrim.

Secara terminologis, istilah radikalisme mengalami perubahan makna yang berorientasi kepada paham yang menginginkan perubahan dengan cara yang kerasdan drastis. Istilah radikalisme memiliki padanan kata dengan revitalisme, Islamisme, Integrisme, Islam radikal atau ekstrimisme Islam (Widyaningsih Rindha, 2019, 23). Penamaan ini terjadi karena memilki arti yang terkandung dalam istilah tersebut hampir sama.

Ditinjau dari defenisinya, menurut BNPT, radikalisme sebagai suatu *s*ikap yang mendambakan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan melakukan perubahan nilai-nilai yang ada secara drastis lewat kekerasan (*violence*) dan aksi-aksi yang ekstrem. (Darni dkk, 2019, 10). Kemudian, Sartono Kartodirdjo berpendapatbahwa radikalisme sebagai suatu gerakan sosial yang melakukan penolakan secara menyeluruh tertib sosial yang sedang terjadi dan bercirikan pada perasaan kesal moral yang kuat untuk melawan dan bermusuhan dengan golongan yang mempunyai hak istimewa dan golongan yang memiliki kekuasaan. (Dauff Yuda Leonardo, Widhiyaastuti Gusti Agung Ayu Dike, 2019).

Ketika zaman Revolusi Perancis (1787-1789), kata “radikal” berarti mengikuti. Sebab ketika raja-raja berkumpul untuk menentukan haluan politiknya parlemen Prancisterbagi dua kubu. Kubu penentang raja disebut aliran atau paham kiri karena duduknya di sebelah kiri, sedangkan kelompok pendukung raja disebut pendukung yang disebut aliran kanan karena duduknya di sebelah kanan. Kemudian di Perancis, kata Radikal ini menjadikan nama

partai pada abad ke-19. Terbukti, di Prancis ketika itu dikenal dengan sebutan anti-monarki.

Dalam kajian studi Ilmu Sosial, Radikalisme bermakna sebagai suatu pandangan yang berupaya melaksanakan perubahan yang mendasar sesuai dengan pemikirannya terhadap realitas sosial atau ideologi yang dimilikinya (Dauff Yuda Leonardo,Widhiyaastuti Gusti Agung Ayu Dike, 2019)

Dalam praktiknya, radikalisme di Indonesia sering dikaitkan dengan terorisme karena kelompok radikal dapat melakukan cara apapun agar keinginannya tercapai, termasuk meneror pihak yang tidak sepaham dengan mereka. Paham radikalisme sendiri bisa memengaruhi seseorang karena ia merasa tidak nyaman dengan situasi dan kondisi yang ia rasakan saat ini. Seperti dengan tidak nyamannya situasi negara dan demokrasi yang ada di dalamnya yang tidak berpihak kepada kehdupannya. Kemudian dengan adanya peristiwa itu, ia mulai mencari ideologi lain termasuk ideologi radikalisme yang karena ketidaktahuan dan kurang kesadaran bahwa orang tersebut masuk ke dalam ajaran radikalisme.Dengan demikian sebutan paham radikalisme dalam artikel ini sama maknanya dengan terorisme.

Ciri-Ciri Paham Radikalisme di Indonesia

Ciri-ciri yang bisa dikenali dari sikap paham radikal: " a. pemikiran tidak toleran dan tidak menghargai pendapat atau keyakinan orang lain; b. sikap fanatik yang menyalahkan orang lain; c eksklusif. Eksklusif artinya mengunggulkan diri dari kelompok lain dan menutup diri dari pemahaman yang terbuka; d. revolusioner. Revolusioner artinya, cenderung menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuan (Dani kk, 2019: 11-12); e. perbuatan mendukung ideologi yang bertujuan politis (Sahrasad Herdi, Chaidar Al, 2017, 94)

Sejak zaman Orde Baru dan zaman Reformasi hingga sekarang ini paham radikal di Indonesia sudah telah berkembang dengan pola yang dinamis. Pada masa Pemerintahan Presiden Soeharto, radikalisme terjadi dengan cara rekayasa politik dengan menjadikan mantan anggota dari gerakan radikal yakni DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) sebagai anggota jihad sehingga memojokkan Islam. Memiliki ciri menjustifikasi penggunaan kekerasan serta aksi terror agar mampu mencapai tujuannya, yakni mendirikan struktur pemerintahan yang berdasarkan ajaran agama Islam DI/TII merupakan gerakan yang muncul pada masa kemerdekaan Indonesia dan gerakan tersebut disinyalir sebagai awal mula pada zaman Reformasi. Tujuan daripada gerakan yang memiliki paham radikal ini ialah ingin menciptakan Darul Islam, yang pada saat menjalankan tujuannya untuk mengganti Ideologi Pancasila menggunakan cara kekerasan.

Pada zaman Reformasi paham radikal terjadi karena kepentingan. Paham radikal yang terjadi di Indonesia sekarang ini disebabkan oleh adanya keinginan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan pemahaman mereka (penganut paham radikal) terhadap agama. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, seringkali cara yang digunakan ialah dengan cara kekerasan.

Memasuki tahun 2000, paham radikal semakin berkembang dan semakin terlihat. Hal tersebut dibuktikan dengan kian maraknya aksi terorisme yang

dilatarbelakangi oleh paham radikal terorisme. Salah satu peristiwa terorisme yang menggemparkan ialah aksi terorisme Bom Bali pada tahun 2002 yang menewaskan ratusan jiwa dan menimbulkan kerugian yang tidak ternilai. Peristiwa tersebut bukan merupakan aksi terorisme pertama dan terakhir yang bermotifkan ideologi, Pada tahun 2018 terjadi pengeboman pada tiga Gereja yang terletak di Surabaya. Motif yang sama kembali terulang, ialah motif ideologi.

Paham radikal di Indonesia sekarang ini semakin berkembang dan saat ini telah memasuki di dunia pendidikan, ialah perguruan tinggi. Hal tersebut dibuktikan oleh pernyataan BIN (Badan Intelijen Nasional) melalui juru bicaranya, Wawan Hari Purwanto yang membenarkan bahwa terdapat tujuh PTN yang terpapar paham radikal. Beliau memaparkan bahwa terdapat 39% mahasiswa pada 15 Provinsi merasa senang dengan paham radikal. Sesuai dengan pernyataan beliau, yang menandakan bahwa perkembangan paham radikal yang terjadi di Indonesia sangatlah pesat dan perlu perhatian serta tindakan khusus, mengingat PTN merupakan salah satu tempat pendidikan namun terdapat beberapa orang yang menolak ataupun ingin merubah atau orang-orang yang berpotensi melakukan gerakan radikal. Pondok pesantren juga merupakan salah satu sarana pendidikan yang dijadikan sebagai tempat tumbuh suburnya paham radikal, diakui terdapat pondok pesantren, terutama yang berbasis *saalafiyah wahabiah* yang memang memberikan kontribusi terhadap paham radikal (Widyaningsih Rindha, 2019: 5-9)

Sebab-sebab paparana radikalisme

Dalam teori perubahan sosial menjelaskan bentuk perubahan sosial yaitu ada perubahan yang bersifat lambat yang disebut evolusi dan perubahan secara bertahap yang disebut *phased,* serta cepat yang disebut *spead*. Perubahan sosial yang bersifat cepat ini orang menamakan revolusioner (Lauer Robert H. 1993, 387-482). Dan perkembangan terakhir radikalisme termasuk kategori perubahan cepat karena ingin merubah sebuah sistem sosial dalam waktu yang singkat yang bisa dilakukan dengan cara pemikiran yang cepat. Yang bisa menjelaskan masalah rasdikalisme, menurut Morris dan Ginsberg ada 8 penyebab orang melakukan perubahan sosial. Kedelapan penyebab perubahan itu antara lain : pertama, keinginan keinginan secara sadar dan keputusan para pribadi, kedua, sikap pribadi yang dipengaruhi oleh kondisi-kondisi yang berubah, ketiga, perubahan struktural dan halangan struktural, keempat, pengaruh-pengaruh eksternal, kelima, pribadi-pribadi dan kelompok yang menonjol, keenam, unsur-unsur yang bergabung menjadi satu, ketujuh, peristiwa- peristiwa tertentu, kedelapan, munculnya tujuan bersama (Soekanto, 1983, 25-26).

Berdasarkan teori yang telah dikemukakan, maka radikalisme dipandang sebagai suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan atas keinginan pribadi dan keputusan pribadi. Karena itu, kelompok radikal tidak memikirkan akibat atas keinginan mereka, yang penting keinginannya bisa tersalur. Sebab seseorang menjadi radikal yaitu kepentingan personal dan ideology kelompok radikal yang menyebarluaskan dengan menebar janji-janji kebutuhan financial yang akan mencukupi seseorang.

Faktor ideologi.

Faktor penyebab utama munculnya radikalisme di Indonesia, pertama, faktor ideologi. Ideologi Pancasila yang sudah bersusah payah dibentuk oleh para pendiri bangsa dan Negara RI, kini dengan mudahnya Kaum radikal menghendaki untuk menggantikan dengan ideologi yang mereka inginkan. Ideologi yang mereka inginkan adalah ideologi Khilafah. Pendapat tersebut sejalan dengan hasil penelitian Alvara yaitu 17, 8 % mahasiswa menyatakan setuju Khilafah sebagai bentuk pemerintahan yang ideal, 82.1 setuju dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Riset yang dibuat oleh BNPT pada 2017 juga menemukan faham radikalisme sudah mulai menyebar di kalangan mahasiswa. Hal ini dibuktikan dari hasil *research* kepada mahasiswa di 15 provinsi di Indonesia. Hasilnya 39% mahasiswa tertarik untuk masuk ke organisasi radikal (mengganti ideologi negara). Temuan ini kalau dilihat dari prosentasinya memang sedikit, tapi kalau dari segi kualitasnya sudah sangat berpotensi.

Hasil penelitian terhadap mantan teroris dan beberapa aktivis kemanusiaan, mengusulkan agar pemerintah mengutamakan pendekatan non-keamanan. Tidak menutup kemungkinan mereka akan kembali mengikuti paham lama jika kebutuhan mereka tdak terpenuhi (Asrori Ahmad 2015)

Sejalan dengan pandangan tersebut, ada 3 faktor yang mendorong munculnya paham radikal di Indonesia, yang pertama ialah perkembangan di tingkat global. Situasi yang kacau di Negara-Negara Timur Tengah sebagai akibat dari ulah Israel, Amerika beserta sekutunya. Faktor kedua ialah masuknya paham *wahabisme* yang mengedepankan budaya Islam Arab yang konservatif ke Indonesia telah ikut mendorong timbulnya kelompok eksklusif yang sering menuduh orang lain yang tidak sama dengan mereka sebagai musuh atau kafir dan dapat diperangi. Faktor yang ketiga ialah kemiskinan, khususnya pada masyarakat yang merasa dirinya termarjinalkan yang berpotensi besar untuk terjebak pada propaganda paham radikal Paham radikal juga berkembang melalui tempat ibadah, yakni masjid. Hasil survei yang dilakukan oleh P3M NU (Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat Nahdlatul Ulama) yang hasilnya diberikan kepada BIN, menjelaskan bahwa terdapat 41 masjid dari 100 masjid yang berada dilingkungan Lembaga, Kementerian dan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) terpapar paham radikal. Golongan penganut Islam radikal berkembang pesat dalam masyarakat. Kelompok tersebut nekat berdakwah menggunakan cara kekerasan ataupun terorisme. Terdapat dua faktor makin kuatnya pondasi paham radikal, yaitu pemahaman agama yang tidak sesuai serta faktor politik yang berkaitan dengan isu nasional dan global.

Penyebaran paham radikal terorisme yang terjadi di Indonesia sekarang ini dinilai sudah tidak mengenal tempat. Penyebaran dapat dilakukan dimana saja, baik pada dunia pendidikan, tempat ibadah, bahkan penyebaran dapat terjadi dilingkungan Pemerintah, yakni pada kawasan instansi Pemerintah dan bahkan BUMN. (Widyaningsih Rindha, 2019: 5-9)

Kemiskinan, kesenjangan ekonomi, sosial

Salah satu faktor yang menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh masuk aliran faham radikalisme yaitu masalah kemiskinan. Karena kehidupan ekonomi yang berkecukupan serta ditunjang oleh oleh janji yang menunjang

kehidupan ekonomi keluarganya, akhirnya mereka mudah terpengaruh masuk dalam aliran ini.

Secara umum perilaku kekerasan sering disebabkan oleh ketidakadilan ekonomi. Kekerasan biasanya disebabkan oleh keinginan manusia yang terlalu tinggi dengan kemampuan yang rendah. Dengan argumen ini, radikalisme muncul karena ekses kapitalisme yang menciptakan mereka yang tak memiliki akses pada sumber-sumber modal. Minimnya akses menjadikan manusia cepat tergoyahkan, sehingga kebenaran sesuatu berdasarkan akal, wahyu, dan tidak lagi menimbulkan ketentraman di dalam jiwa orang yang meyakininya tidak lagi membekas.

Keadaan ekonomi yang kurang memadai dapat dianggap menjadi salah satu faktor penyebab untuk menarik generasi muda dalam melakukan tindakan radikal. Biaya sekolah yang mahal, membuat mereka menjadi putus sekolah. Tidak mempunyai pekerjaan hingga penghasilan yang memadai. Hal ini sejaln dengan perpespektif ekonomi dimana kesenjangan ekonomi bisa menimbulkan kecemburuan sosial. (Zamzamy Ahmad , 2019, 5). Faktor sosial masih erat hubungannya dengan faktor ekonomi. Sebagian masyarakat kelas ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit, mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap dapat membawa perubahan drastis pada hidup mereka. Akibatnya mereka merasa terasing dengan lingkungan masyarakat karena lebih percaya kepada tokoh yang dianggap radikal. Kelompok terorisme tidak merasa menjadi bagian lagi di masyarakat. Tidak merasa memiliki hubungan emosional dan terikat terhadap masyarakat di sekelilingnya. Karena itu, kelompok radikal seringkali melakukan aktitas penghancuran terhadap fasilitas umum dan memakan korban rakyat sipil. Suatu bentuk transformasi yang berlangsung cepat pada superstruktur yuridis dan politis masyarakat, serta dinilai sebagai salah satu cara yang dianggap sah dalam upaya memperjuangkan hak masyarakat tersebut (Ritaudin Sidi, 2014: 3-26)

Hasil penelitian tentang penanganan orang yang keluar dari tahanan karena kasus terorisme selama ini masih mengutamakan pendekatan keamanan dibandingkan dengan kesejahteraan. Persoalan ini sejalan dengan pandangan Zamzamy Ahmad(2019, 9). Radikalisme timbul karena kekuatan kelompok yang sangat dominan sebagai suatu sistem dan terjadi kesenjangan sosial yang tinggi di masyarakat sehingga membawa akibat fatalism.

Dendam politik *(political vendetta).*

Yang membuat faham radikalisme berkembang juga ditunjang oleh faktor politik yang terkesan memberikan kesempatan kepada mereka bisa berkembang di Indonesia.Bahkan kelompok yang menganut faham radikalisme mendapatkan dukungan politik oleh oknum tertentu di tanah air ini. Khususnya kelompok yang melakukan dendam politik terhadap penguasa negara atau terhadap lawan politiknya. Dendam politik ini biasa dilakukan oleh kalangan politisi. Kemudian ia melakukan suatu tindakan perlakuan untuk menggagalkan suatu tindakan atau perlakuan untuk menggagalkan atau membatalkan gagasan, ide dan tindakan tersebut dengan berbagai cara, sebagai akumulasi kekecewaan terkadang politisi menjadikan ajaran agama sebagai suatu motivasi untuk membenarkan tindakannya.

Di samping itu, pemikiran sebagian masyarakat yang menilai seorang pemimpin negara lebih berpihak pada golongan tertentu, mengakibatkan munculnya kelompok- kelompok masyarakat yang melakukan protes atas kebijakan Negara dari aspek sosial, agama maupun politik. Dalam pandangan mereka ingin menyampaikan protes dengan argumen menegakkan keadilan tetapi dalam kenyataannya kelompok-kelompok ini justru memperparah keadaan.

Faktor lainnya, paham radikal merasa tidak ada tempat untuk menyampakan aspirasi politik di tanah air ini. Karena aspirasi politik mereka tidak tersalurkan melalui jalur politik formal berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, maka aksi dan tindakan radikal yang dilakukan sebagai sebuah solusi atau terobosan kontroversial untuk dapat menyampaikan pesan organisasi ke masyarakat luas.

Secara politik karena aspirasi kaum radikal tidak tersalutkan, maka mereka menggunakan smbol-simbol keagamaan atau slogan keagamaan untuk memengaruhi pengikutnya melakukan tindakan brutal. Slogan-slogan agama kaum radikalis mencoba menyentuh emosi keagamaan dan menggalang kekuatan untuk mencapai tujuan "mulia" dari politiknya. Ada yang menyebutnya, memanipulasi agama karena sebagian perilaku mereka berakar pada interpretasi agama dalam melihat fenomena historis. Hal ini terjadi karena adanya faktor pemikiran radikalisme dapat berkembang. Pemikiran bahwa segala sesuatunya harus dikembalikan ke agama walaupun dengan cara yang kaku dan menggunakan kekerasan. Dari perspektif sosial politik, radikalisme timbul karena adanya dominasi kelompok pada suatu sistem dan kesenjangan yang tajam di masyarakat sehingga menimbulkan fatalism (Zamzamy Ahmad, 2019: 5).

Radikalisme politik yang terjadi berawal dari psikologi manusia yang mengalami kekecewaan. Mereka kecewa karena harapan dan realita tidak sesuai dengan keyakinan sebagai hak *(value expectation),* yang mungkin mereka peroleh. Dalam perspektif politik kekecewan ini muncul ketika mereka yang memiliki kekuasaan (negara, capital atau pemilik modal, birokrasi, partai politik dan lain-lain) tidak mampu mewujudkan segala macam kebutuhan atau janji mereka terhadap kelompok tertentu yang masuk dalam lingkup kekuasaannya. (Ritaudin Sidi, 2014, 3-26)

Faktor kebijakan Pemerintah.

Salah satu kriteria Negara yang ideal adalah pemerintahan yang berwibawa. Dengan kewibawaannya pemerintah mampu mendamaikan kelompok masyarakat yang berbeda pendapat dan keingian yang kontradiktif. Dengan kekuasaan dan kekuatan pemerintah yang berwibawa mampu meredam dan menekan kelompok-kelompok masyarakat yang ingin berbuat jahat, makar dan permusuhan.

Sebagian manusia mempunyai watak dan tabiat yang ingin menang sendiri, bersaing dengan cara yang tidak sehat, memaksakan keinginan kepada orang lain dengan cara kekerasan dan memusuhi orang lain yang menghalangi keinginannya. Mereka tidak akan sadar dan menahan diri dari watak buruknya itu, terkecuali dengan adanya kekuatan yang besar dan berwibawa. Keadilan

merupakan salah satu dasar kebahagiaan dunia dan tiada ketertiban di dunia tanpa keadilan. Wajiblah sesorang berlaku adil pada dirinya sendiri, kemudian memperlakukan orang lain berlaku adil. Dengan tiga bentuk yaitu adil kepada bawahan, adil kepada atasan dan adil kepada yang setara.Kebijakan yang dilakukan pemerintahan sekarang ada yang menamakan demokrasinya terlalu "kebablasan", akibatnya ada kesan protes atau penyampaian aspirasi atas nama rakyat sudah tidak menjaga etika lagi. Karena pemerintah terlalu membiarkan masyarakat untuk menyampaikan pendapat yang terlalu kasar. Termasuk penyampaian pendapat yang sifatnya aprresiasi terhadap pemerintah ketika diskusi secara transparan di media sosial. Ketika ada pertentangan antara pemerintah dengan tokoh masyarakat kelompok radikal ikut-ikutan menyampaikan pendapat sehingga menimbulkann persepsi yang buruk terhadap pemerintah. Dengan demikian, masyarakat menjadi radikal jika pemerintah melakukan langkah-langkah represif terhadap protes dan aspirasi masyarakat ketika pemerintah gagal menyediakan pertumbuhan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan pendidikan yang terjangkau (Zamzamy Ahmad, 2019: 5).

Faktor pendidikan

Tujuan pendidikan yang mulia dan beraklak terkadang dimanfaatkan oleh faham ini dengan cara melakukan doktrinasi berbagai ajaran yang membuat anak didik mendapatkan pencerahan dari ideologi radikalisme. Beberapa lembaga pendidikan tertentu berhasil menjalankan doktrin ini. Dengan demikian *output* bisa menjadi pengikut aliran ini. Faktor pendidikan yang salah ini menjadi faktor penyebab munculnya ajaran radikal dan terorisme.

Indikator yang menunjukkan dunia pendidikan mendapatkan pengaruh dari aliranradikalisme yaitu adanya keterlibatan mahasiswa dalam gerakan tersebut. 1). Hasil penelitian Mardiyah di Unesa telah berkembang kelompok Jama'ah Tarbiyah, kelompok Hizb al- Tahrir (sekarang HTI), Jama'ah tabligh, sampai Negara Islam Indonesia (NII). 2). Hasil penelitian Syarif Hidayatullah di Jakarta melaporkan 58,2% setuju mengubah Indonesia menjadi negara Islam (Mubarak, 2010). 3). Di Makasar 51,6 % mahasiswa bersikap intoleran terhadap agama lain. 4). Penelitian pada Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung diketahui sebagai pengaruh yang sangat lemah (Syafe'i, 2018). 5). Penelitian yang mengambil tempat di dua PTN di Surabaya menemukan orang yang toleransinya tinggi rata-rata memiliki tingkat prasangka sosial yang sangat rendah, tetapi orang tinggi prasangka sosialny toleransi beragama sangat rendah. Penelitian ini juga menemukan aktivis organisasi kemahasiswaan cenderung tinggi prasangka sosialnya dan rendah toleransi beragamanya 6) Sepuluh perguruan tinggi negeri terpapar radikalisme keagamaan yang tersebar di Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat (Marsudi Imam, 2019, 18-22)

Faktor psikologi

Secara sikologi target yang dilakukan kelompok radikal adalah anak muda yang masih mncari jati diri atau iidentitas diri. Anak mudah dianggap sebaga kelompok yang masih membutuhkan panutan hidup. Kelompok radikal mlakukan perekrutan prtama dan masuk dalam seleksi oleh organisasi radikal dengan berkedok keagamaan dengan forum studi terbatas. .Jika ada anggota baru

sudah lolos seleksi mereka melakukan komunikasi intens secara terus menerus. Dn dituntun untuk mengikuti arus peruban dengan penanaman nilai-nilai radikal.

Menurut Teori Frustrasi, agresi yang diajukan Dollard dan koleganya pada tahun 1939, mengisyaratkan bahwa tidak tercapainya hal-hal yang diinginkan mendatangkan frustrasi dan menimbulkan kemarahan. Beberapa hasil studi mutakhir masih mendukung bahwa frustrasi berperan mendatangkan agresi.

Teori deprivasi relatif yang merupakan perluasan teori frustrasi agresi juga berpandangan serupa. Gurr menjelaskan bahwa penyebab paling dasar terjadinya tindak kekerasan massa, politik, dan revolusi adalah timbulnya ketidakpuasan sebagai akibat adanya penghayatan atau persepsi mengenai sesuatu yang hilang yang disebut deprivasi relatif *(relative deprivation)*.

Deprivasi relatif terjadi karena tidak tercapainya nilai harapan (volue expectations) berdasarkan nilai kemampuan (volue capabilities). Sementara nilai (value) adalah peristiwa, kejadian, objek dan kondisi yang diperjuangkan orang yaitu kesejahteraan, kekuasaan, dan nilai-nilai interpersonal. Pada keadaan yang sarat tekanan, frustrasi, dan keputusasaan menyelimuti kelompok atau orang-orang yang terkena deprivasi relatif yang bersifat berat dan merata, maka keadaan itu merupakan prakondisi bagi lahirnya gerakan protes kolektif untuk mengubah keadaan. Gurr mengemukakan bahwa penyebab utama gerakan protes dan kekerasan sosial pada awalnya adalah berkembangnya ketidakpuasan, kemudian terjadi politisasi atas ketidakpuasan itu, dan akhirnya aktualisasi kekerasan terhadap sasaran dan aktor-aktoryang dituju (Zamzamy Ahmad, 2019, 10).

Fenomena *Post Truth.*

Salah satu penyebab yang membuat anak muda cepat terjaring dalam kelompok kaum radikal ini karena mudah terpengaruh secara pribadi dari ajaran kaum radikal. Anak mudah percaya karena janji-janji yang menggiurkan meskipun kenyataannya tidak seperti yang dijanjikan. Mereka menyampaikan pesan terhadap calon pengikutnya dengan perasaan meyakinkan tapi kenyataannya bohong. Dan para pengikutnya sudahmasuk dalam lingkaran setan kaum radikal. Pola menyebarkan informasi semacam ini sudah dikembangkan melalui media sosial yang mereka kembangkan.

Di era ini orang menggunakan media sosial melalui HP Android saja sudah menyebar berbagai informasi. Bahkan kalau cara tatap muka tidak bisa terus menerus ketemu, maka serangan informasinya melalui HP. Tidak jarang HP ini menerima berbagai berita *HOAX* yang dibuat kesan sungguh-sungguh terjadi. Penggunaan HP sudah disalahgunakan. Sudah tidak mampu menjaring berbagai informasi yang bermanfaat karena keterbatasan kemampuan dan penguasaan teknologi. Peluang inilah yang membuat kelompok radikal mudah menjaring pengikutnya yaitu *self-implosions*, menyambut serangan informasi secara membabi buta. Apalagi mereka sudah menemukan 'dunia yang sebenarnya', dunia di luar HP adalah fantasi, dunia dalam HP adalah 'konkret'. Baudrilarrd menyebut fenomena ini *'hiperrealitas',* saat realitas sebenarnya digantikan oleh realitas baru, yang ternyata 'lebih sebenarnya'. Implosi selalu dinantikan oleh pengguna HP apalagi anak mudah yang memiliki kesenangan terhadap sesuatu yang baru.*Era post-truth* dapat disebut sebagai pergeseran sosial spesifik yang

melibatkan media arus utama dan para pembuat opini.

Berkaitan dengn berita Hoax di media sosial ini, kelompok jaringan teororismempergunakannya untuk melakukan propaganda, membangun jaringan, mengkomunikasikan antarjaringan, dan sarana rekrutmen baru dari sel-sel terorisme. Dalam dunia maya menggunakan istilah *cyberterroris* yang disampaikan Barry Collin pada tahun 1997. Dengan adanya media sosial, semua kalangan masyarakat – terutama pemuda – bisa mengakses situs radikal, chat via online, dan aktivitas lainnya di dunia maya yang memungkinkan terjadinya proses radikalisasi. (Zamzamy Ahmad, 2019: 15).

Radikalisme Bertentangan dengan Ideologi Pancasila

Kehadiran paham radikalisme di Indonesia menurut penulis sebagai bentuk pertentangan dan pelecehan terhadap eksistensi ideologi Pancasila yang sudah didirikan oleh pendiri bangsa dan Negara NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Padahal pendiri bangsa dan Negara NKRI melalui perjuangan yang telah membawa korban mnusia khususnya tokoh Pahlawan Bangsa Negara yang meninggal ketika di medan pertempuran melawan penjajah Bangsa dan NKRI. Berapa nyawa yang sudah dikorbankan demi membela tanah air ini. Paham radikalisme sudah tidak menghargai perjuangan para pahlawan bangsa, Mereka dengan mudahnya melakukan tindakan brutal dengan alasan ingin menggantikan ideology NKRI dengan ideology yang dikehendakinya.

Pelecehan terhadap Ideologi Pancasila

Beberapa indikator yang menunjukkan tindakan radikalisme yang bertentangan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila yaitu adanya kebebasan paham radikalisme hidup di tanah air ini merupakan bentuk pelecehan sebab mereka sudah bisa menikmati segala fasilitas yang ada di tanah air ini. Mereka bebas mencari nafkah dan menjalani kehidupan di tanah air tanpa ada yang menegur dan menekan kehidupannya.Semakin bebas mereka hidup di tanah air ini semakin banyak peluang bagi paham radikalisme untuk mensosiaiisasi ideologinya dan terbukti selama ini pengikutnya semakin banyak karena mereka mendapatkan pelung untuk melakukan apa saja. Beberapa hasil penelitian yang menarik menunjukkan mereka sudah berhasil merekrut anggota yang banyak. Bahkan pelaku tindakan Bom Bunuh Diri sudah terpusat di beberapa Kabupaten di Indonesia. Tindakan ini jelas bertentangan dengan silai pertama. Di Indonesia pengakuan terhadap adanya Ketuhanan tidak hanya dimiliki oleh salah satu agama tetapi dimiliki oleh semua Agama yang diakui oleh Negara. Karena itu, Agama apapun yang ada di Indonesia wajib hukumnya untuk saling menghormati dan menghargai sebagai sesama makluk ciptaan Tuhan. Sikap-sikap yang tidak terpuji seperti melakukan diskriminasi, melakukan provokasi terhadap sesama dengan mengatasnamakan agama, melakukan fitnah terhadap agama lain dan menganggap agamanya sendiri paling benar, memberikan simbol kafir terhadap agama lain adalah bagian daripada upaya pembangkangan dan pertentangan terhadap sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima Pancasila. Sebab pemaknaan terhadap ideologi Pancasila tidak hanya ditinjau dari satu sila saja tetapi memiliki benang merah yang kuat dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Dengan kata lain, nilai sila pertama Ketuhanan menjiwai nilai kemanusian (sila kedua, nilai persatuan

(sila ketiga), nilai permusyawaratan (demokrasi) (sila keempat), nilai keadilan (sila kelima). Pemaknaannya tidak boleh terpisah-pisah tetapi memiliki suatu kesatuan antara unsur yang satu dengan yang lainnya.

Kalau dikaji dari nilai sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung makna bangsa Indonesia percaya dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya masing-masing. Hal ini menunjukkan kemajemukan agama yang diakui Indonesia. Kemajemukan ini diharapkan tidak saling memisahkan, melainkan saling menhormati, saling bekerja untuk meraih tujuan bersama yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Karena itu, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak menghormati dan tidak menghargai agama orang lain. Semua warga Negara mempunyai kedudukan dan posisi yang sama untuk saling menghormati, saling mencintai antara agama yang dianut. Karena semua agama memiliki ajaran yang baik yang selalu mengajarkan perdamaian, kasih, persaudaraan. Tidak ada agama yang mengajarkan untuk saling mmbenci satu sama lain dan melakukan pembunuhan terhadap sesama manusia, Karena itu, apakah tindakan atau sikap yang dilakukan oleh paham radikalisme untuk membunuh sesama manusia dan merugikan orang lain melalui kegiatan mengajak untuk melakukan pemboman tempat ibadat dan fasilitas umum adalah perbuatan yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila.

Ditinjau dari sila kedua Pancasila, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab sebagai bentuk pengakuan bahwa martabat manusia dijunjung tinggi di Negara Indonesia.

Dalam sila kedua ini mnekankan nilai-nilai kemanusiaan, menyangkut peradaban bangsa dan Negara. Memperlakukan sesama manusia dengan adil dan beradab. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang beradab yang memiliki nilai, etika dan moral yang selalu mengajarkan tentang kebaikan dan kemanusian. Karena itu, tindakan membenci sesama manusia, melakukan ancaman terhadap sesama warga yang diikuti dengan pemboman atau perilaku bom bunuh diri, yang dilakukan paham radikalisme sangatlah bertentangan nilai dari sila kedua yaitu Kemanusian yang Adil dan Beradab. (Widharsana Petrus Danan, 2018, 93)

Kalau dikaji dari sila ketiga Persatuan Indonesia menyadarkan masyarakat bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk yang telah membentuk satu kesatuan. Kemajemukan tampak kelihatan dari banyaknya suku, etnis budaya, agama dan adat istiadat yang tergabung di dalamnya. Menurut data yang diperoleh dari BPS, terdapat 1211 bahasa daerah, 300 kelompok etnis, 1340 suku dengan adat istiadatnya masing-masing, 17504 pulau. Penekanan pada sila ketiga ini yaitu memfokuskan pada penghayatan nilai nasionalisme, nilai patriotisme cinta tanah air, rela berkorban, membela Negara dan wawasan kebangsaan. Nilai-nilai ini menjadi luntur ketika diporakporandakan oleh *issue-issue* paham radikalisme yang berkembang di masyarakat akhir-akhir ini. Kegiatan provokasi yang dilakukan paham radikalisme melalui ajakan untuk ikut melakukan tindakan kekerasan terhadap sesama manusia, maupun penyerangan terhadap rumah-rumah ibadat bagian daripada upaya memecah belah nilai persatuan dan kesatuan NKRI. Dasar pendirian Negara yang dibangun atas dasar cita-cita yang mulia dan luhur dari

berbagai perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan budaya menjadi rusak oleh paham radikalisme ini. Karena ajaran paham ini melakukan kegiatan mengadu domba sesama agama demi kepentingan ideologinya. Padahal pendiri bangsa dan Negara yang terdiri dari tokoh agama sudah sepakat membentuk Negara sebagai Negara yang menganut paham Pancasila. Bukan paham agama satu golongan agama saja.

Dalam sila keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan dan Perwakilan. Nilai yang perlu dihayati pada sila keempat adalah nilai demokrasi dimana kontennya melalui nilai musyawarah dan mufakat. Dalam perspektif Pancasila terdapat nilai demokrasi yakni pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Rakyat memberikan mandat kepada para wakilnya dalam menjalankaan roda pemerintahan dan menggariskan sebaiknya semua keputusan diakukan secra bersama-sama agar tercapai kesepakatan yang diterima oleh semua pihak (Widharsana Petrus Danan, 2018. 155)

Dalam faham radikalisme tidak memiliki nilai demokrasi dia hanya mengajarkan doktrin ideologi khilafah yang merusak nilai-nilai sendiri daripada demokrasi di Indonesia. Ajarannya hanya mengajarkan kebencian, permusuhan, fitnah, melalui anggota kelompok yang direkrutnya. Mengajarkan cara-cara kekerasan dengan mengebom, munculnya bom panic, menjadikan polisi menjadi target operasi maupun orang atau fasilitas umum mnjadi sasaran hanya karena berbeda atribut di dunia merupakan pengingkaran terhadap musyawarah dan mufakat. Aksi terorisme yang dilakukan merupakan aksi yang berlebihan karena tidak mampu menghargai perbedaan dan tidak mampu mentransformasikan perbedaan agama menjadi perekat melalu jalan dialog dan diskusi (Subagyo Agus, 2020, 18-21)

Ditinjau dari sila kelima Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. nilai yang ditekankan adalah terwujudnya suatu masyarakat yang adil dan makmur, tidak ada penghinaan, tidak ada penindasan tidak ada penghisapan manusia oleh manusia, sebab sudah menjadi tujuan NKRI seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 45. Kondisi adil dan makmur ini dilihat dari meratanya distribusi kekayaan dan kesempatan untuk seluruh warga masyarakat. Di samping itu, keadilan sering merujuk pada proses untuk memastikan bahwa setiap orang memenuhi peranan mereka dalam menjalankan kewajiban mereka dan menerima apa yang menjadi hak mereka dalam kehidupan bermasyarakat.dan bernegara. Dari sisi kewajiban pemerintah, keadilan sosial biasanya diukur dari bagaimana pemerintah menjalankan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, menciptakan jaring pengaman dan mengupayakan keadilan ekonomi. Sebaliknya masyarakat mendukung upaya pemerintah itu dengan menjalankan kewajiban mereka, khususnya dengan membayar pajak. Jadi dalam masyarakat yang berkeadilan sosial ada kesadaran masyarakat untuk saling memberi dan menerima sesuai hak dan kewajiban masing-masing demi kesejahteraan dan kepentingan umum (Widharsana Petrus Danan, 2018, 177-178)

Alat untuk mengukur keadilan ini seharusnya diukur dari kemampuan pemerintah dalam menjalan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan. Alat

ukur yang dipakai oleh paham radikalisme hanya diukur dari keadilan ekonomi menurut kepentingannya. Ketidakadilan ekonomi ini menjadi alat propaganda dari paham radikal untuk menyatakan propaganda ketidakadilan yang dilakukan pemerintah. Dengan demikian, paham radikal dapat melakukan tindakan aksi terror melalui cuci otak atau *brain wash* dan cara indoktrinasi lainnya untuk meyakinkan anggota dalam rangka mendesreditkan pemerintah. Sudah menjadi doktrin mereka melemparkan issue jurang pemisah antara yang kaya dan miskin dengan tujuan mendiskreditkan pemerintah. Sinyalemen yang dilakukan pihak radikal ini didukung dari hasil penelitian.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahid Institute pada 2019 terjadi peningkatan intoleransi dan radikalisme di Indonesia dari sebelumnya 46% meningkat menjadi 54%. Hasil penelitian ini didukung oleh kelompok masyarakat yang mudah diajak kelompok radikal untuk melakukan tindakan brutal. Prosentasenya sekitar 11,4 juta jiwa atau 7,1% yang mau diajak kelompok ini. Selain itu, sekitar 0,4% atau sekitar 600.000 jiwa yang pernah melakuan tindakan brutal (Subagyo Agus, 2020, 14-15).

Sikap intoleran ini juga ditemukan dari hasil penelitian yang dilakukan tim survey LSI. Hasil penelitian LSI yaitu 59,1 % responden muslim keberatan jika dipimpin oleh pihak atau orang yang berbeda keyakinan, sedangkan 31,3 % merasa tidak keberatan jika dipimpin oleh orang yang bukan muslim. Sisanya menjawab tidak tahu alias tidak memberikan jawaban. Dengan demikian, menurut penelitian LSI, mayoritas warga muslim intoleran terhadap orang yang berbeda keyakinan jika menjadi kepala daerah.

Kemudian dalam hal izin pendirian rumah ibadah. Hasil penelitian yang LSI yaitu 53 persen warga muslim keberatan membangun rumah ibadah terhadap yang berbeda keyakinan. Hanya 36,8 persen yang mengaku tidak keberatan. Sikap intoleransi dalam bidang religius kultural pada tahun 2010 cenderung menurun, tetapi pada tahun 2017 cenderung meningkat lagi terutama dalam pembangunan rumah ibadah. (Subagyo Agus, 2020, 16-19).

a. Lemahnya pengawasan aparat keamanan terhadap kehidupan paham radikalisme ini terutama pelaku kekerasan menunjukkan tidak bermaknanya petugas keamanan dalam menjaga ketertiban dan pertahanan terhadap bangsa dan NKRI. Apakah petugas keamanan memiliki strategi khusus dalam menangkap paham radikalisme ini menjadi bahan untu dikaji lebih mendalam lagi. Apakah petugas keamanan belum menemukan data yang kuat untuk bisa menangkap mereka menjadi teka-teki bagi masyarakat. Atau pihak keamanan sengaja memberikan kesempatan kepada paham ini untuk melakukan aktivitas keseharian? Sambil menanti ada bukti pelanggaran baru melakukan penangkapan bagian daripada strategi yang dilakukan aparat Negara. Ironisnya, pernah terjadi beberapa daerah tertentu di Indonesia melakukan kerja sama latihan perang antara pihak keamanan dengn pasukan dari paham radikalisme.
b. Lemahnya kesadaran masyarakat akan eksistensi Pancasila sebagai pegangan hidup atau falsafah hidup bangsa Indonesia. Kalau kesadaran *(awareness)* masyarakat dan pengetahuan masyarakat tinggi tentunya mereka tidak mudah menerima aliran ideologi lain terhadap kehidupan berbangsa dan

bernegara. Kalau mereka memiliki pemahaman yang tinggi terhadap ideologi Pancasila mereka menjadi kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh paham yang lain. Dan eksistensi Pancasila sebagai ideologi Pancasila tidak hanya menjadi jargon semata-mata. Beberapa hasil penelitian yang menunjukkan Pancasila hanya menjadi jargon yaitu adanya PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terlibat dalam kasus ini. Ironis sekali PNS yang diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat dalam menghayati dan mengamalkan nilai-nilai dari Sila Pancasila justru menjadi pembangkang terhadap ideology Pancasi. Terbukti hasil Survei dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tahun 2019, 19, 4 % PNS di Indonesia menolak ideologi Pancasila.

c. Sistem Pendidikan Nasional yang masih lemah dalam melakukan kontrol terhadap pelaksanaan pendidikan baik dalam skala nasional maupun dalam tingkat lokal. Selama ini sudah ada pengawas sekolah dari tingkat SD sampai dengan SMA, tetapi pelaksananya mungkin bisa berjalan optimal. Terbukti masihada pelajar yang terkapar paham radikalisme, bahkan gurunya malah ada yang terlibat. Persoalan untuk dikaji dan dievaluasi, apakah Pendidikan Pancasila sudah diberikan atau tidak dijalankan menjadi bahan untuk instropeksi bagi guru. Kalaupun sudah diberikan dimana letak persoalannya menjadi bahan kajian untuk diinstropeksi diri bagi guru. Sebab hasil penelitian yang dilakukan masih menunjukkan adanya keterlibatan pelajar yang mendapat pengaruh dari paham radikalisme ini. Data hasil penelitian tersebut yaitu 50 % siswa setuju melaukan tindakan radikal. Jumlah siswa yang setuju dengan kekerasan untuk melakukan tindakaan sebagai solidaritas agama yaitu 52,3 % siswa, sedangkan 14, 2 % setuju dengan kegiatan serangan bom. Survey ini dilakukan oleh Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian sejak taun 2010 sd 2011. Kemudian Survei yang dilakukan oleh lembaga lain yaitu Penelitian yang sejalan dilakukan Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di Kabupaten ini, ditemukan sekolah dan aparat PNS yang tidak mau hormat pada sang saka merah putih dan lagu Indonesia Raya. Sangat prihatin, salah seorang siswa SMP mengaku tidak tahu lagu Indonesia Raya dan tidak tahu lagu Indonsia Raya, tidak hafap Pancasila karena tidak pernah diajarkan oleh guru di sekolahnya. (Pudjiastuti Sri Rahayu 2020, 32– 39).

d. Mendapat perlindungan dari masyarakat. Indikasi lain yaitu terkesan beberapa tokoh masyarakat juga melindungi paham ini. Sebenarnya, kalau paham semacam ini hadir di tengah masyakat tokoh lokal dari tingkat RT sampai pada Kepala Daerah mempunyai kewajiban moral untuk melindungi warga yang terlibat dalam kasus paham radikalisme ini. Pada lingkungan tempat tinggalpenulis terkesan ada warganya yang terlibat dalam gerakan ini tetapi RT dan RW-nya terkesan melindungi mereka. Semacam terkesan didiamkan saja atau dibiarkan. Kalau aparat keamanan bersentuhan dengan orang semacam ini baru RW dan RT ikut-ikutan. Keberanian dari pihak pimpinan lokal untuk menolak gerakan semacm ini tidak ada.

Strategi kebijakan pencegahan dan pembinaan berkelanjutan

Berbagai cara dilakukan untuk mencegah adanya radikalisme masuk kampus. Untuk pembinaan mahsiswa perlu dilakukan, *pertama,* pembinaan yang

berkelanjutan. Pembinaan yang berkelanjutan dilakukan melalui tahap berikut:

Tahap awal (penerimaan mahasiswa baru). Ketika selesai seleksi penerimaan mahasiswa baru perlu dilakukan pembinaan *soft skill* mahasiswa saat penerimaan baru. Kurikulum pembinaannya harus dirancang melalui tim ahli yang dikoordinasi oleh pakar kepribadian. Tahap pembinaan berjenjang. Ketika mahasiswa sudah mulai kuliah pembinaan berjenjang bisa dilakukan secara kontinyu pada tiap semester baik malalui *outbond* maupun game-game yang membentuk watak dan karakter mahasiswa.

Tahap terakhir pembinaan *self responsibility*. Pendampingan kegiatan *soft skill* yang berkelanjutan tidak bisa diremehkan. Menteri Pendidikan Nadiem Makarim memiliki pengalaman dalam mengevaluasi kesuksesan seseorang yang terlalu berorientasi pada mitos NEM, IPK, Ranking sebagai penentu kesuksesan seseorang. Dia berpendapat selama 22 tahun menjalankan dunia pendidikan sejak SD sampai dengan kuliah di luar negeri. Kemudian dia mengajar 15 tahun di Universitas di Negara Maju (AS, Korsel, Australia). Pengalamannya ini dia mengakui tidak ada relevansinya dari ketiga aspek yaitu NEM, IPK, Ranking.

Menurut research Stanley, ada 10 faktor teratas yang akan mempengaruhi kesuksesan seseorang yaitu pertama, faktor kejujuran, kedua, disiplin keras, ketiga, mudah bergaul, keempat, dukungan pendamping, kelima, kerja keras, kecintaan pada yang dikerjakan, ketujuh, kepemimpinan, kedelapan, kepribadian kompetitif, kesembilan, hidup teratur, kesepuluh, kemampuan menjual ide.

Membentuk karakter adalah kebutuhan utama. Bangsa Indonesia bukan tidak membutuhkan oranng yang pintar karena bangsa Indonesia sudah banyak orang pintar namun bangsa Indonesia membutuhkan orang-orang yang cerdas, memiliki karakter beradab, sopan santun dan berakhlak mulia. Bukan teori tapi praktik langsung dalam kehidupan harian, cerdas menyikapi hidup, cerdas menciptakan peluang.

Strategi pendampingan ini berisi materi: memperkenalkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, memahamkan ilmu pengetahuan dengan baik dan benar, meminimalisisr kesenjangan sosial, menjaga persatuan dan kesatuan, mendukung aksi perdamaian Aksi perdamaian, berperan aktif dalam meningkatkan pemahaman akan hidup kebersamaan, menyaring informasi yang didapatkan.

Selain melakukan pembinaan berjenjang juga memaksimalkan program pembinaan melalui Pendidikan Kewarganegaraan (PKn), Pendidikan Pancasila. Kehadiran mata kuliah ini dalam dunia pendidikan baik dari Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi (PT) diharapkan memperkuat pengajaran tentng nilai *(values)* nasionalisme, nilai kebangsaan, norma, moral dan etika dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kedua, menanamkan dan mengamalkan penghayatan niilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupm berbangsa dan bernegra. Acuannya pada Pancasila karena Pancasila sudah menjadi ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang tidak bisa digantikan dengan ideolog lain. Terutama karena sumber nilai yang ada pada Pancasila bersumber dari kearifan budaya local (budaya bangsa) dan mngakomodir keragaman bangsa. Nilai-nilai Pancasila sangat sarat makna terhadap perdamaian, keadilan,

religiositas.

Ketiga, Untuk meminimalisir kemunculan dan dampak radikalisme, ada suatu program yang dinamakan dengan deradikalisasi. Pemerintah melalui Badan Nasional Terorisme memiliki program deradikalisasi. Di Indonesia, program deradikalisasi ditujukan kepada pencapaian dua tujuan utama. Pertama, kelompok inti dan pendukung agar meninggalkan cara-cara kekerasan dan teror dalam memperjuangkan misinya. Kedua, baik kelompok inti, pendukung dan simpatisannya agar memoderasi paham-paham radikal mereka seturut dengan paham kelompok Islam yang moderat dan cocok dengan nilai-nilai NKRI. (Zamzamy Ahmad, 2019: 15).

Sikap pemerintah terhadap eksistensi dari paham radikalisme sudah tegas-tegas menolak. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia perbuatan terror masal, dana *public,* atau gangguan keamanan. Soal sikap pemerintahan Amerika terhadap terorisme dan radikalismem sudah jelas dan tegas menolak masuknya faham tersebut ke Amerika Serikat bahkan tidak mau berkompromi (Chaidar Sahrasad Herdi, 2017, 95)

PENUTUP

Berdasarkan fenomena yang telah dikemukakan, maka penulis menyimpulkan:

1. Makna kata radikalisme yang dulunya diartikan sebagai upaya untuk menelaskan sebuah persoalan sampai kepada akar permasalahannya kini dimaknakan sama dengan istitalh teororisme. Sebab dalam ralitanya yang dilakukan paham radikalisme di Indonesia sama dengan perilaku terror yang melakukan ancaman kekerasan, intoleransi terhadap orang lain.
2. Unsur penyebab terkaparnya paham radikalisme yaitu ingin mengubah ideologi Negara Indonesia dengan ideologi yang lain, faktor kemiskinan dan kesenjangan sosial, faktor demam politik, faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor kebijakan pemerintah, faktor psikologis dan krisis identitas, faktor *post truth.*
3. Tindakan brutal yang dilakukan paham radikalisme di Indonesia sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ideologi Pancasila. Sebab paham radikalisme di Indonesia menginginkan pergantian ideologi Pancasila dengan cara kekerasan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, sedangkan dalam ideologi Pancasila sarat dengan makna yang mengakui adanya kebesaran Tuhan, penghargaan terhadap martabat manusia, menjunjung tinggi asas persatuan dan kesatuan melalaui nilai demokrasi demi menegakan kebenaran dan keadilan sesui dengan cita-cita luruh bangsa Indonesia.
4. Keprihatinan terjadi karena paham radikalisme ini dapat mempengaruhi elemen-elemen yang ada dalam dunia pendidikan. Baik oknum mahasiswa, dosen, pelajar dan guru sudah ada yang mengikuti doktrn dari paham radikalisme ini. Karena itu, lembaga pendidikan harus semakn ketat melakukan pembinaan terhadap kaum pelajar dan mahasiswa supaya bisa mengantisipasi gerakan radikalisme berkembang lebih luas.
5. Strategi pembinaan yang bisa diterapkan untuk mencegah radikalisme di

kampus yaitu metode pembinaan berjenjang yang dimulai sejak pembinaan menjadi mahasiswa baru maupun ketika sudah kuliah sampai mendapatkan sebuah sertikat yang dinamakan *self responsibility* atau sertifikat *soft skill.*

6. Pemerintah bersama elemen masyarakat diharapkan tetap tegas dan ketat dalam mengontrol gerakan radkalsme ini melalui tindakan pencegahan atas gerakan radikalisme, penegakan aturan hukum, dan pembinaan yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Asrori, Ahmad, "Radikalisme di Indonesia antara Historis dan Antropisitas", Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam Volume 9, Nomor 2, Desember 2015, Lampung.

Dauff Yuda Leonardo, Widyastuti I Gusti Agung Ayu Dike, "Perkembangan Pengaturan Paham Radikal Terorisme di Indonesia", Fakultas Hukum UniversitasUdayana, 2019,

Dani dkk, *Menangkal Radikalisme di Kampus,* Pusat Pembinaan Ideologi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Surabaya, 2019.

Duverger, Maurice. 2000. *The Study of Politics* dalam Dakidhae*, Sosiologi Politik*. PT Raja Grando Persada bekerjasama dengan Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, Jakarta.

Hidayati, Husnul. (2014). Pandangan Mahasiswa terhadap Radikalisme (Studi Penelitian Deskriptif di UIN Mataram. *Jurnal Penelitian Keislaman.*

Herdi Sahrasad Chaidar Al, *Fundamentalisme, Terorisme dan Radikalisme, Perspektif atas Agama, Masyarakat dan Negara*, CSS-UI (Freedom Foundation nd Centre for Strategic Studies – University of Indonesia, 2017, 94

Muchith M, Saekan, "Radikalisme dalam Dunia Pendidikan", Jurnal ADDIN, Vol. 10, No. 1, Februari 2016, STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia.

Muchith M, Saekan. (2016). Radikalisme dalam Dunia Pendidikan. *Jurnal ADDIN*. Vol. 10 (1). STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia.

Lauer, Robert H. (1993) *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Rineka Cipta. Bandung.

Pujiastuti, Sri Rahayu. (2020). Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Mencegah Paham Radikal. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*. Vol. 19 (2).

Ritaudin Sidi. (2014). Radikalisme Negara dan Kekuasan Perspektif Politik Global, Kalam: *JurnalAgama dan Pemikiran Islam*.Volume 8 (2).

Rindha Widyaningsih. (2019, 23). *Deteksi Dini Radikalisme*. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Jenderal Soedirman.

Lauer, Robert H. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Rineka Cipta Bandung.

Herdi Sahrasad Chaidar Al. (2017). *Fundamentalisme, Terorisme dan Radikalisme, Perspektif atas Agama,Masyarakat dan Negara*, CSS-UI

(Freedom Foundation nd Centre for Strategic Studies – University of Indonesia.

Sahrasad Herdi, Chaidar Al, Fundamentalisme, Terorisme dan Radikalisme, Perspektif atas Agama, Masyarakat dan Negara, CSS-UI (Freedom Foundation nd Centre for Strategic Studies – University of Indonesia, 2017:94)

Subagyo Agus, "Implementasi Pancasila dalam Menangkal Intoleransi, Radikalismedan Terorisme," Jurnal Rontal, Keilmuan PKn, Volume 6 No 1, April 2020, 14-15).

Soekanto Soerjono (1983). *Teori Sosiologi*, Ghalia Indonesia,Jakarta,

Widharsana Petrus Danan, *Mengamalkan Pancasila dalam Terang Iman Katolik*, PT Kanisius, 2018, , 83-178)

Zamzamy Ahmad, Menyoal Rdikalisme di Media Digital, Dakwatuna: Jurnal Dakwahdan Komunikasi Islam, 2019, 15.